



**MODEL KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS
LINGKUNGAN (*GREEN BUDGETING*)
DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Abdul Fikri Faqih

Universitas Diponegoro

Semarang

2017

MODEL KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS
LINGKUNGAN (*GREEN BUDGETING*)
DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Disertasi
untuk memperoleh gelar Doktor
dalam Ilmu Lingkungan

Oleh
Abdul Fikri Faqih
Lahir di Tegal

LEMBAR PENGESAHAN

**MODEL KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS
LINGKUNGAN (*GREEN BUDGETING*)
DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**ABDUL FIKRI FAQIH
NIM : 21080110500001**

Telah diuji dan dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Desember 2017
oleh tim penguji Program Doktor Ilmu Lingkungan
Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro

Telah disetujui oleh :

Promotor:

Ko Promotor:

**Prof. Sudharto P Hadi, MES, Ph.D
NIP. 195403091980031003**

**Dr. Hartuti Purnaweni, MPA
NIP. 196112021988032002**

**Sekolah Pascasarjana
Universitas Diponegoro
Dekan,**

**Program Doktor Ilmu Lingkungan
Sekolah Pascasarjana
Universitas Diponegoro
Ketua,**

**Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA
NIP. 196112281986031004**

**Dr. Hartuti Purnaweni, MPA
NIP. 196112021988032002**

**MODEL KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS
LINGKUNGAN (*GREEN BUDGETING*)
DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Oleh :
ABDUL FIKRI FAQIH
NIM : 21080110500001

Telah disetujui oleh :

Pimpinan Sidang :

Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA

Sekretaris Sidang :

Dr. Hartuti Purnaweni, MPA

Anggota Tim Penguji :

Prof. Sudharto P Hadi, MES, Ph.D

Dr. Hartuti Purnaweni, MPA 

Dr. Rahmat Bowo, SH, MH 

Dr. Ir. Sri Puryono, KS, MP 

Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA

Prof. Dr. Sri Suwitri, M.S

Dr. Edi Santoso, SU

Dr. Henna Rya Sunoko, Apt., MES

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di mukabumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Q.S Al Araf: 56).

Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau kesuatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran (Q.S Al Araf: 57)

Disertasi ini kupersembahkan untuk umat manusia di dunia, bangsa Indonesia dan warga Jawa Tengah

Terkhusus kepada istriku tercinta Zubaedah dan anak-anakku yang sangat kusayangi: Kayyis, Ashim, Miqdad, Kholid, Mayya, Afifa, dan Urwah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Fikri Faqih
NIM : 21080110500001
Mahasiswa : Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan
Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) Disertasi yang berjudul “**Model Kebijakan Anggaran Berbasis Lingkungan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah** ” merupakan karya ilmiah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor) di perguruan tinggi manapun.
- 2) Disertasi ini adalah murni ide, rumusan dan hasil penelitian saya serta dilakukan tanpa bantuan orang lain, kecuali Tim Promotor dan narasumber.
- 3) Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4) Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh, dan sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Diponegoro.

Semarang, Desember

2017

Yang Membuat

Pernyataan,

Meterai

Abdul Fikri Faqih

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut dituangkan dalam lembar pengantar disertasi ini kecuali syukur kepada Allah SWT, karena dinamika dan gelombang proses penyusunan disertasi bahkan segala aral yang melintang, dengan segala keterbatasan akhirnya bisa diselesaikan dengan baik.

Atas kesabaran dan ketulusannya dalam membimbing, memberi masukan dan mengevaluasi karya ilmiah ini, perlu disampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES, PhD selaku Promotor.
2. Dr. Hartuti Purnaweni, MPA selaku Ko-Promotor dan Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan.
3. Prof. Dr. Ir. Purwanto DEA selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
4. Dr. Henna Rya Sunoko , Apt, MES selaku penguji.
5. Dr. Edi Santoso, SU selaku penguji
6. Dr. Rahmat Bowo Suharto SH, MH selaku penguji eksternal.
7. Profesor Dr. SriSuwitri, MSi selaku penguji.
8. Dr. Sri Puryono, KS MP selaku penguji
9. Seluruh narasumber di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai, antara lain:
 - A. H. Ganjar Pranowo, SH. MIP. selaku Gubernur Jawa Tengah (2013-2018)
 - B. Letjen (Purn.) Bibit Waluyo selaku Gubernur Jawa Tengah (2008-2013)
 - C. Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si. selaku Wakil Gubernur Jawa Tengah (2013-2018)
 - D. Dr. Sri Puryono, KS MP. selaku Sekretaris Daerah Jawa Tengah (2013-2018)
 - E. Drs. Hadi Prabowo, M.M. selaku Sekertaris Daerah Jawa Tengah (2008-2013)

- F. Drs. Agus Sriyanto, M.Si. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah (2013-2016)
- G. Drs. Joko Sutrisno, MSi selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah (2008-2013)
- H. Drs. Herru Setiadhi, MSi selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah (2013-2016)
10. Seluruh Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2009-2014 dan periode tahun 2014-2019.
11. Pimpinan Komisi D yang membidangi infrastuktur dan lingkungan hidup DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019.
12. Pimpinan dan anggota Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014.
13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap proses, baik mulai dari pengajuan proposal, pengambilan data, penyusunan tulisan, hingga hasil disertasi ini.

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan pengetahuan, khususnya ilmu lingkungan dan kontribusi solutif bagi perbaikan pemerintah dalam menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan.

Meski sudah dikerjakan dengan segala daya upaya yang maksimal, namun sangat disadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Karena itu, tidak hanya dimintakan permohonan maaf, namun diharapkan adanya penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang guna melengkapi sejumlah kekurangan yang ada.

Penulis

Abdul Fikri Faqih

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Penjelasan Judul	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Ekstra	iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
GLOSARI	xvii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
RINGKASAN	xxiii
SUMMARY	xl
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2. Perumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3. Orisinalitas	Error! Bookmark not defined.
1.4. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1. Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Lingkungan.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Teori Manajemen Lingkungan.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Teori Kebijakan Publik	Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Teori Anggaran dan Implementasinya.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.4. Konstitusi Kebijakan Anggaran	Error! Bookmark not defined.

2.1.5. Kewenangan Anggaran Daerah	Error! Bookmark not defined.
2.1.6. Proses Penganggaran	Error! Bookmark not defined.
2.1.7. Teori Formulasi Kebijakan dan Sistem Penganggaran	Error! Bookmark not defined.
2.1.8. Penganggaran Sebagai Bagian Dari Proses Kebijakan Publik	Error! Bookmark not defined.
2.1.9. Formulasi Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
2.1.10. Konsep Politik Anggaran	Error! Bookmark not defined.
2.1.11. Anggaran Berbasis Lingkungan	Error! Bookmark not defined.
2.1.12. Anggaran: Kesejahteraan Versus Lingkungan	Error! Bookmark not defined.
2.2. Komitmen Terhadap Penganggaran Berbasis Lingkungan	Error! Bookmark not defined.
2.3. Model Penyusunan Kebijakan Anggaran.....	Error! Bookmark not defined.
2.4. Model Pernyataan Anggaran Berbasis Isu	Error! Bookmark not defined.
BAB III KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP	Error! Bookmark not defined.
3.1. Kerangka Teori	Error! Bookmark not defined.
3.2. Kerangka Konsep	Error! Bookmark not defined.
BAB IV METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
4.1. Tipe Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.2.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.2. Ruang Lingkup Waktu dan Tempat.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.3. Keterbatasan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.3. Desain Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.4. Fenomena Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.5. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
4.6. Alur Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.7. Pengolahan dan Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
4.8. Validasi Data.....	Error! Bookmark not defined.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Error! Bookmark not defined.**

5.1. Proses Penyusunan Anggaran**Error! Bookmark not defined.**

5.1.1 Hasil penelitian**Error! Bookmark not defined.**

5.1.2 Bahasan**Error! Bookmark not defined.**

5.2. Komitmen Stakeholder Melalui Pendekatan *Political Will***Error! Bookmark not defined.**

5.2.1 Hasil penelitian**Error! Bookmark not defined.**

5.2.2 Bahasan**Error! Bookmark not defined.**

5.3. Model Penyusunan Kebijakan Anggaran.....**Error! Bookmark not defined.**

5.3.1 Hasil Penelitian**Error! Bookmark not defined.**

5.3.2 Bahasan**Error! Bookmark not defined.**

5.4. Model Anggaran Komprehensif, Terfokus dan Partisipatif**Error! Bookmark not defined.**

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**Error! Bookmark not defined.**

6.1. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**

6.2. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA57

LAMPIRAN255

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 1.2 Luas Rehabilitasi Hutan Provinsi Jawa Tengah 2010-2014 **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 1.3 Kandungan Logam Berat **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 1.4 Latar Belakang Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 1.5 Penelitian Mengenai *Green Budgeting* .. **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2.1 Perbedaan Manajemen Tradisional dengan Manajemen Ecocentric **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.1 Tugas Pembidangan Komisi Di DPRD Jawa Tengah **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.2 Sumber Data Primer Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.3 Teknik Pengumpulan Data Dalam Riset Kualitatif..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 5.1 Contoh Isi SMS Gateway SEMESTA LESTARI. **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 5.2 Aktor dan Dokumen Dalam Perencanaan Anggaran Berbasis Lingkungan **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 5.3 Alokasi Anggaran Program Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 2010-2014 (Rp) **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 5.4 Anggaran Program Non Aparatur Dinas Kehutanan Pemprov. Jawa Tengah Tahun 2010-2014..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 5.5 Struktur Kegiatan pada Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Badan LH Jawa Tengah 2014 (Rp)..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 5.6 Perbandingan Rata-rata Alokasi Anggaran Lingkungan Hidup Pulau Jawa dan Bali tahun 2013 - 2016..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 5.7 Perbandingan Rata – rata Alokasi Anggaran Lingkungan Hidup 5 Negara ASEAN Th 2014 - 2016..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 5.8 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 5.9 Realiasi Jenis Pajak Provinsi Jawa Tengaah 2012-2015 (Rp) **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 5.10 Peran Aktor Dalam Perencanaan Anggaran Di Jawa Tengah..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 5.11 Format *Green Budget Statement* dan Cara Penyusunanya..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Anggaran Berbasis Lingkungan Pasal 45 UU 32 /2009
(Santoso,2015)..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 1.2 Proyeksi Beban Pencemaran Udara Menurut Jenis Pencemaran
(Tanpa CO) di Jawa Tengah (000 Ton/Tahun) ..**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.1 Tiga Elemen Sistem Kebijakan menurut William N. Dunn..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.2 Prosedur Perencanaan Penganggaran Daerah ...**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.3 Model Teori Sistem Politik menurut David Easton **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.4 Kurva Lingkungan Kuznets**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.5 Tiga elemen kunci political will menurut Malena .. **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.6 Siklus Skematik Kebijakan Publik.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.7 Implementasi Kebijakan.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.8 Model Implementasi Kebijakan**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.1 Kerangka Teori..... i
- Gambar 3.2 Kerangka Konsep **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Tengah.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.2 Bagan Alur Penelitian**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.3 Siklus Triangulasi.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5.1 Prosedur Penganggaran Daerah (eksisting) **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5.2 Diagram Alur Pembahasan APBD di DPRD Provinsi..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5.3 Keterkaitan antara tahap perencanaan dan penganggaran..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5.4 Usulan Formulasi Kebijakan Pra RAPBD (usulan 1) **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5.5 Skema Pembicaraan Pendahuluan (rincian usulan 1) **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5.6 Pertumbuhan Tahunan Anggaran Program Publik Badan LH Provinsi Jawa Tengah.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5.7 Program Dengan Target Kinerja Pelestarian Lingkungan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014**Error! Bookmark not defined.**

- Gambar 5.8 Perbandingan Rata-rata Anggaran Lingkungan Hidup Pulau Jawa dan Bali Tahun 2013-2016.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5.9 Rincian Perbandingan Alokasi Anggaran Lingkungan Hidup Pulau Jawa dan Bali Tahun 2013-2016.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5.10 Perbandingan Alokasi Anggaran Lingkungan Hidup 5 Negara ASEAN Tahun 2014 – 2016**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5.11 Perbandingan Alokasi Anggaran Lingkungan Hidup 5 Negara ASEAN Tahun 2014 – 2016**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5. 12 Rehabilitasi dan perlindungan hutan tahun 2010 – 2014 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5. 13 Persentase Belanja Program Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di BLH Tahun 2014 (dalam juta) **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5.14 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5.15 (a).Pertumbuhan Kendaraan Bermotor dan (b).Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (dalam trilyun) ..**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5.16 Alur Dokumen Penganggaran Saat Ini (eksisting) **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5.17 Alur dokumen model PAL/GBS (usulan 2) ... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5.18 Proses Penyusunan Anggaran Daerah (saat ini/eksisting) **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5.19 Model Partisipasi untuk Anggaran Berbasis Lingkungan (usulan 3)**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5. 20 *Comperhensive, Focused and Participatory Budgeting Process***Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR SINGKATAN

ABL	Anggaran Berbasis Lingkungan
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BLH	Badan Lingkungan Hidup
BPKH	Balai Pemantapan Kawasan Hutan
CO	Karbon Monoksida
DAK	Dana Alokasi Khusus
GBMM	<i>Green Budget Matrix Model</i>
GBS	<i>Green Budget Statement</i>
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
MBO	<i>Managemen By Objectives</i>
OD	<i>Organisitional Development</i>
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
JICA	<i>Japan International Cooperation Agency</i>
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
NOAA	<i>National Oceanogrphic and Atmospheric Administration</i>
PAL	Pernyataan Anggaran berbasis Lingkungan
PEB	<i>Participatory Emissions Budgeting</i>

PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPLH	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PSDA	Pengelolaan Sumber Daya Air
RTH	Ruang Terbuka Hijau
RUU	Rancangan Undang-Undang
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SLHD	Status Lingkungan Hidup Daerah
SO ₂	Sulfur Dioksida
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
UNEP	<i>United Nations Environment Programs</i>
WCED	<i>World Commission on Environmental and Development</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>

GLOSARI

Birokrasi	sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah sesuai hierarki, jenjang dan distribusi jabatan yang ada
Eksisting	benar keberadaannya di lokasi secara fisik
Epistemologi	dimensi filsafat ilmu tentang bagaimana ilmu itu diperoleh/ metode ilmiah
Fiskal	berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara
<i>Green Budgeting</i>	Menurut Wilkinson (2008) <i>green budgeting</i> (anggaran berbasis lingkungan) : paradigma penganggaran yang mengutamakan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam penyusunan, implementasi, pengawasan sampai evaluasi pendapatan dan belanja pemerintah
Iklim	keadaan hawa (awan, kelembapan, suhu, hujan, dan sinar matahari) di lokasi tertentu dalam jangka waktu yang agak lama (30 tahun) di suatu daerah
Inklusif	termasuk, terhitung

Indikator	sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan
Instrumen	alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu
Implementasi	pelaksanaan dan penerapan
Investasi	penanaman uang atau barang dalam lembaga usaha atau proyek dengan maksud memperoleh keuntungan
Kalkulasi	perincian biaya, ongkos, atau pengeluaran, perhitungan
Kolaboratif	(perbuatan) kerja sama
Komitmen	perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu, kontrak
Komponen	bagian dari keseluruhan, unsur
Konsensus	kesepakatan kata atau permufakatan bersama
Konservasi	pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian
Korporasi	Satu atau beberapa lembaga usaha yang sangat besar yang dikelola dan dijalankan sebagai sebuah perusahaan besar
Legislatif	dewan yang berwenang membuat undang-undang
NO ₂	Nitrogen Dioksida
Optimal	orang yang selalu berpengharapan (berpandangan) baik dalam menghadapi segala hal
Orisinalitas	keaslian, ketulenan

Otoritas	hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain
Politis	bersangkutan dengan politik
Polusi	pencemaran air, udara, lingkungan
Positivis	sikap mau diajak bekerja sama atau melakukan sesuatu
Prioritas	yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain
Program	rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan
Proyeksi	perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang menggunakan data yang ada (sekarang)
<i>Pro Environment</i>	berpihak pada kelestarian lingkungan
<i>Pro Growth</i>	berpihak pada pertumbuhan ekonomi
<i>Pro Poor</i>	berpihak pada rakyat miskin
<i>Pro Job</i>	berpihak pada penciptaan tenaga kerja
<i>Public Policy</i>	kebijakan publik
Rezim	tata pemerintah negara, pemerintahan yang berkuasa
Siklus	beberapa elemen yang saling berkaitan sehingga menjadi sebuah rangkaian yang utuh
<i>Stakeholders</i>	kelompok atau individu yang mendukung suatu program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi
Strategi	perencanaan yang teliti pada suatu kegiatan agar tercapai tujuan tertentu

Substantif	mengena pada maksud sebenarnya
<i>Sustainable development</i>	proses pembangunan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang
Transformasi	perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi)

ABSTRAK

Masalah lingkungan di Jawa Tengah ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang rendah. Banyaknya bencana alam menjadi indikasi terlampauinya daya dukung lingkungan. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, 23 diantaranya rawan banjir dan longsor. Meskipun demikian alokasi anggaran untuk sektor lingkungan hidup masih relatif kecil dibandingkan APBD secara keseluruhan yaitu rata-rata sejak tahun anggaran 2002 hingga 2012 hanya 0,34%. Padahal tuntutan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk itu dilakukan penelitian yang bertujuan mengungkap: (1) proses penyusunan anggaran pemerintah provinsi Jawa Tengah yang berbasis lingkungan hidup; (2) komitmen pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses penyusunan anggaran yang berbasis lingkungan hidup; serta (3) menyusun model dalam penyusunan anggaran berbasis lingkungan hidup (*green budgeting*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap narasumber terpilih yang terlibat dalam proses penganggaran, terdiri atas: eksekutif, legislatif, dan unsur masyarakat pegiat lingkungan. Sumber data sekunder berasal dari dokumen-dokumen. Selain itu, dilakukan analisis terhadap dokumen penganggaran daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berlaku selama lima tahun, dan Peraturan Daerah berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Di dalam rangkaian proses penganggaran daerah sejak dari tahapan musrenbang hingga menjadi dokumen RAPBD, ditemukan kurangnya peran partisipasi publik, khususnya pemerhati lingkungan hidup. Komitmen *stakeholder* dalam penganggaran berbasis lingkungan juga rendah, disebabkan rendahnya pemahaman tentang anggaran berbasis lingkungan, serta inkonsistensi antara dokumen RPJMD dan APBD. Diajukan rekomendasi agar melibatkan komunitas pegiat lingkungan hidup dalam proses penyusunan anggaran. Untuk mewujudkan komitmen stakeholder dalam penganggaran berbasis lingkungan perlu dibentuk regulasi yang lebih teknis seperti

PerDa dan PerGub mengenai keterlibatan komunitas lingkungan hidup dan didukung dengan sosialisasi yang memadai. Untuk memastikan anggaran lingkungan masuk dalam dokumen perencanaan, maka dibutuhkan model pernyataan anggaran berbasis lingkungan. Model berupa dokumen pernyataan anggaran hijau yang disusun oleh setiap organisasi perangkat daerah.

Kata kunci: masalah lingkungan, alokasi anggaran, kebijakan, komitmen, green budgeting, Jawa Tengah

ABSTRACT

The environmental problems in Central Java are characterized by low environmental quality index. The frequent of natural disaster as indicated by the exceeding the environmental carrying capacity and environmental carrying capability. From 35 regencies / municipalities in Central Java, 23 of them are prone to flooding and landslides while the budget allocation for the environment sector is still relatively little compared to the overall budget. Since the fiscal year of 2002 to 2012, the average was only 0,34% allocation for the environmental sector. Law 32 of 2009 requires local government to allocate adequate budget for the environmental protection and management as well as programs oriented toward sustainable development. The research is aimed to reveal; (1). Central Java environmental based budgeting process, (2). The stakeholder commitment to environmental based budgeting, (3). model of environmental based budgeting (green budgeting).

This study used a qualitative approach through in-depth interviews of the selected respondents involved in budgeting process, consisting of; executive, legislative, and community element involved in environmental movement. Primary data gathered through interview and secondary data from available documents. In addition, budget document were analyzed from Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) that valid for five years, and local regulations in the form of Regional Budget (APBD) Central Java Province annually from 2010 to 2014. In a series of local budgeting process since the stage of deliberation of development plans (musrenbang) until Regional income and Expenditure Budget Plans (RAPBD) document, it was found the lack of public participation, particularly, the environmental activist. It revealed that the commitment from stakeholder to environmental based budgeting was low. This was due to lack of understanding about environmental based budgeting, as well as inconsistency between RPJMD and APBD. From this result, the researcher recommend to increase public participation in the budgeting process by involving environmental activist community. In order to realize the commitment of the stakeholders in environmental based budgeting it is necessary to establish more detailed regulation such a regional regulation and governor regulation about involving environmental community, and supported by adequate socialization. In addition to ensure that the

environmental budget were included in the planning document, it requires a model of green budget statement formulated by government institution.

Keyword : environmental problem, budget allocation, policy, commitment, green budgeting

RINGKASAN

I. PENDAHULUAN

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Jawa Tengah cukup memprihatinkan. Pada periode 2009 – 2011, angkanya hanya berkisar 49 – 55, berada jauh di bawah IKLH nasional yang berkisar 59 – 61 pada periode tahun yang sama (IKLH 2013). Konsep Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah cara mengukur kualitas lingkungan hidup yang ketentuannya diadopsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup hasil kerjasama antara *Virginia Commonwealth University* (VCU) dengan Biro Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan tiga indikator : kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan (IKLH 2013 : 3).

Kondisi di atas diperparah dengan program pembangunan pemerintah yang cenderung mengabaikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga Jawa Tengah termasuk provinsi yang rawan banjir, tanah longsor, amblesan, kekeringan, dan bencana lingkungan lainnya. Bencana tersebut merupakan akibat dari terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan (Hadi, 2015).

Untuk menanggulangi bencana dan penurunan kualitas lingkungan hidup, pemerintah Jawa Tengah dalam kurun waktu 2002 – 2012 hanya mengalokasikan rata-rata 0.34% saja dari APBD per tahun. Padahal, Undang Undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 45 mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan wajib

mengalokasikan dana alokasi khusus bagi daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kebijakan anggaran berbasis lingkungan (*Green Budgeting*) di pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuan khususnya adalah :

1. Menganalisis proses penyusunan APBD provinsi Jawa Tengah untuk fungsi lingkungan hidup.
2. Menganalisis komitmen para penyusun APBD provinsi Jawa Tengah terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Merumuskan rekomendasi agar penyusunan APBD provinsi Jawa Tengah berbasis lingkungan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konteks manajemen lingkungan hidup, yang menjadi teori induk dalam penelitian ini, menurut Shrivastava, ada dua kategori manajemen, yakni (1) manajemen tradisional dan (2) manajemen ekosentrik. Dalam pengorganisasiannya, manajemen tradisional sangat struktural hirarkis, diputuskan dari atas, kewenangannya terpusat dan dengan beda pendapatan di masyarakat yang tinggi. Sedangkan pada manajemen ekosentrik, tidak terlalu hirarkis struktural, keputusan diambil secara partisipatif, dengan kewenangan terdesentralisasi dan beda pendapatan masyarakat rendah. (Hadi: 2014:xi-xii).

Dua model manajemen di atas sangat dipengaruhi proses dari tiap elemen, tahapan sampai proses pengambil kebijakan. Menurut William Dunn, kebijakan publik pada hakikatnya adalah hubungan timbal balik antara ketiga elemen yang terdiri dari kebijakan publik itu sendiri, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan (Dunn, 2003: 44).

Dunn (2003:24-25) juga membuat teori tentang tahapan pengambilan kebijakan publik ke dalam lima tahapan, yakni: (1) Tahap Penyusunan Agenda, (2) Tahap Formulasi Kebijakan, (3) Tahap Adopsi Kebijakan, (4) Tahap Implementasi Kebijakan, serta (5) tahapan Evaluasi Kebijakan.

Sedangkan menurut David Easton (Lihat Varma, 1992), memandang bahwa proses merumuskan kebijakan publik merupakan suatu sistem yang berisi berbagai kegiatan yang satu dengan yang lain saling terkait. Semua masukan (*input*) dari berbagai komponen dalam sebuah sistem menjadi energi bagi sistem, sehingga sistem itu bisa berjalan. *Input* itu diubah oleh proses dalam sistem politik yang

menjadi kebijakan (*output*) dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan yang berakibat kepada sistem itu sendiri maupun berdampak pada masyarakat lingkungan.

Selain proses mekanismenya, penyusunan anggaran berbasis lingkungan (*green budgeting*) juga sangat dipengaruhi oleh faktor komitmen para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat di dalamnya. Komitmen tersebut, berkaitan erat dengan teori tentang kemauan politik (*political will*). Menurut Carmen Malena (2009: 21-23) kemauan politik ini terbagi atas tiga faktor kunci penting yang memengaruhinya, yakni : 1). keinginan politik (*political want*), yang pada level individu, keinginan politik dapat dilihat dari nilai-nilai personal dan prioritas diri; 2) kemampuan politik (*political can*), dilihat dari pengetahuan, keahlian, dan hak-hak personal; serta 3) keharusan politik (*political must*) dipengaruhi oleh kepekaan terhadap tugas-tugas yang diembannya (*sense of duty*).

Sedangkan untuk mencari model kebijakan, dapat dilihat dari analisa formulasi kebijakan yang diterapkan. Sabatier (1986:21-48) memperkenalkan dua model yang bekerja pada tahap formulasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Teori Sabatier ini ditafsirkan oleh Wibawa (1994:2) bahwa tahap implementasi kebijakan dengan logika *bottom-up* adalah sebuah proses pengambilan kebijakan yang diawali dengan penyerapan aspirasi, dan meminta dukungan dari masyarakat. Adapun implementasi kebijakan dengan logika *top-down* adalah pengejawantahan kebijakan makro yang masih bersifat abstrak menjadi kebijakan yang lebih konkrit dan bersifat mikro.

Selain model tersebut di atas, menurut teori Russel, terdapat tiga model teori preferensi politik *stakeholders* yang terlibat dalam memenuhi tuntutan *green budgeting* (Russel, 2001:6-10), yakni: Model Politik Partisan: komposisi politik partai pemerintah memengaruhi alokasi sumber daya fiskal, Model Pelaku Veto: di sini, pelaku veto diposisikan sebagai individu atau institusi yang diharapkan memberikan persetujuan terhadap perubahan status quo, serta Model Preferensi Sektoral (pilihan publik): lebih menunjukkan pilihan publik daripada preferensi pelaku politik maupun veto karena politisi maupun pelaku veto menjadikan pilihan publik untuk pengambilan keputusan.

UU 32/2009 tentang PPLH, mewajibkan Pemda untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Konsep penganggaran berwawasan lingkungan hidup tersebut dikenal dengan istilah *green budgeting*. Konsep ini tidak mengkhuskan bahwa anggaran berbasis lingkungan itu hanya berada di satuan kerja pemerintah yang mengurus tentang lingkungan hidup saja atau dalam konteks provinsi adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH). Menurut Wilkinson (dalam kautsar, 2010:1), *green budgeting* (anggaran berbasis lingkungan) terjadi bila unsur kelestarian lingkungan diprioritaskan dalam menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi dalam pendapatan dan belanja pemerintah, inilah paradigma yang dibangun dalam penganggaran. Atau bisa disederhanakan menjadi : segala sesuatu yang terkait dengan pendapatan dan belanja pemerintah diupayakan guna menjaga prinsip kelestarian lingkungan.

Green budgeting mengarahkan kegiatan-kegiatan pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, dapat menghasilkan sampah lebih sedikit, mengurangi dan menggunakan sumber daya lebih sedikit, sekaligus efektif, efisien dan ekonomis, mengurangi efek gas rumah kaca, serta mengurangi kesenjangan sosial masyarakat (Kautsar, 2012:3).

Dalam mendetailkan teori *green budgeting* sebenarnya dijelaskan juga *practical theory* seperti yang diteliti di Punjab India menjadi sebuah teori model yang relevan untuk pernyataan anggaran berbasis isu agar terrealisasikannya anggaran untuk isu spesifik, dalam hal ini berarti untuk isu lingkungan. (TERI,2014: 26).

III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Instansi Pemerintah provinsi Jawa Tengah dan DPRD provinsi Jawa Tengah pada April 2014 sampai dengan Maret 2015 (masa transisi di dua periode DPRD yakni akhir Periode 2009-2014 hingga awal Periode 2014-2019).

B. Desain Penelitian

Dalam usaha untuk mencari jawaban atas perumusan masalah dari penelitian yang berjudul “Model Kebijakan Anggaran Berbasis Lingkungan (*Green Budgeting*) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data *purposive sampling* atau sampel tujuan, yang dilakukan dengan cara menganalisa berbagai sumber informasi yang dijadikan acuan.

Pendekatan kualitatif dipilih karena di dalam penelitian ini akan diteliti sebuah fenomena yang belum diketahui sebelumnya dan tidak dapat diperhitungkan sebelum peneliti terjun ke lapangan.

Penelitian kualitatif memberikan perhatian utama pada realitas sosial, karena merupakan sasaran dari penelitian sosial yang hakikatnya adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk memahami dunia empiris masyarakat manusia secara cermat berdasarkan kenyataan-kenyataan. Jika ingin memahami tindakan manusia dengan benar, menurut para proponent metode kualitatif, tidak dapat digunakan teori-teori atau konsep-konsep tentang tindakan sosial

yang telah dirumuskan terlebih dahulu, konsep dan hipotesa akan muncul dari data itu sendiri (Hadi 1997: I-8).

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumen. Wawancara dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) (Soemotro, 1988:61) berupa wawancara terstruktur, dimana peneliti telah menyiapkan daftar permasalahan dan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

C. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang bersumber dari para *stakeholder* merupakan data primer. Pengambilan data primer bertujuan untuk memahami secara keseluruhan mengenai sistem yang terkait, mengidentifikasi *stakeholder* kunci, serta meneliti kepentingan dan lingkungan *stakeholder*.

Hasil pengumpulan data baik dari sumber data primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif, maksudnya adalah bahwa data yang telah dikumpulkan selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dengan mengkualifikasikan jawaban narasumber, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori-teori. Teori awal atau payung globalnya yakni teori tentang manajemen lingkungan. Kemudian *middle theory* sebagai alat untuk menganalisa adalah teori-teori tentang perilaku *stakeholder* (teori aktor), sistem, kebijakan publik, komitmen, anggaran dan teori model. Pada tataran praktis atau *practical theory* digunakanlah berbagai regulasi atau peraturan-peraturan yang berlaku yang terkait. Terakhir untuk menganalisa adalah teori dari *best practice (empirical theory)* sekaligus untuk menyodorkan model alternatif adalah *issue based budgeting*.

IV. HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN

A. Proses Pembahasan APBD

1. Tahapan Perencanaan Anggaran

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dirinci dan diatur oleh UU 32/2004 sebagaimana diubah menjadi UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Lebih rinci lagi dalam PP 8/2008 tentang Tata Cara Pembangunan Daerah dan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Mendagri dan Bappenas untuk mengatur mekanisme pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan.

Proses tersebut diawali dengan musrenbang tingkat desa yang diikuti oleh elemen masyarakat dan pemerintah desa. Hasilnya berupa usulan program kegiatan yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), APBD kabupaten/kota, dan provinsi. Dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kecamatan, yang pesertanya adalah perwakilan dari musrenbang sebelumnya (desa) beserta aparat pemerintah kecamatan, bisa juga menghadirkan narasumber dari DPRD sesuai daerah pemilihannya. Dalam forum ini dibahas prioritas desa agar masuk dalam prioritas kecamatan. Kemudian, dokumen hasil musrenbang kecamatan dibawa ke musrenbang tingkat kabupaten/kota bersama dengan prioritas yang dibawa

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

SKPD membawa prioritasnya dalam dokumen Renja SKPD. Kemudian Musrenbang tingkat kabupaten/kota menyinkronkan dokumen Renja SKPD dengan hasil musrenbang kecamatan yang kelak didialogkan dengan pokok-pokok pikiran DPRD dari hasil reses menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun yang akan datang. Begitu selanjutnya sampai tingkat provinsi dan pusat.

2. Tahapan Pembahasan Legislatif-Eksekutif

Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di DPRD dibagi menjadi dua tahapan/ tingkat. Pada awal pembahasan tingkat 1 yang berlangsung dalam rapat paripurna DPRD, Gubernur menyampaikan nota keuangan RAPBD di tahun bersangkutan untuk diserahkan pembahasan lanjutan kepada Badan Anggaran (Banggar). Banggar kemudian dijadwalkan bertemu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat-rapat anggaran. Penjelasan diberikan oleh TAPD mengenai apa yang dimaksud gubernur dalam penyampaian nota keuangan secara global pada rapat paripurna sebelumnya. Pada tahap selanjutnya digelar rapat paripurna lanjutan untuk mendengarkan pandangan umum Banggar dan fraksi – fraksi. Pandangan umum fraksi-fraksi berupa pandangan politik masing-masing fraksi yang berisi harapan masyarakat terhadap APBD tahun itu

dan problematika di masyarakat untuk bisa diadvokasi dalam wujud program dan anggaran.

Rapat paripurna berikutnya diadakan kembali dengan agenda mendengarkan jawaban gubernur atas pandangan umum Badan Anggaran dan pandangan umum fraksi- fraksi. Dalam pidato jawabannya, Gubernur bisa saja mengakomodasi permohonan Banggar dan fraksi-fraksi, dan juga memberi penjelasan mengapa problematika di masyarakat itu tidak diakomodasi dalam RAPBD atau mungkin kemudian ada digit baru yang muncul. Pembahasan RAPBD berikutnya secara lebih detail diserahkan kepada komisi-komisi yang ada di DPRD bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Komisi A bermitra dengan SKPD bidang pemerintahan dan Sekertariat Gubernur bersama bironya. Komisi B bermitra dengan SKPD bidang pertanian, perkebunan, UMKM, dan koperasi. Komisi C bermitra dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD). Komisi D bermitra dengan SKPD bidang infrastruktur, antara lain Dinas Pengelolaa Sumber Daya Air (PSDA), Pekerjaan Umum (PU) - tata ruang dan lingkungan. Sedangkan, Komisi E bermitra dengan SKPD bidang kesejahteraan rakyat, mencakup Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Perempuan dan Anak, serta Kebencanaan. Komisi-komisi itu secara detail membahas RAPBD beserta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD, kemudian setiap komisi membawa kesimpulan hasil rapat komisi untuk dibahas di rapat

anggaran di Banggar. Rapat anggaran yang kedua di Banggar tersebut terdiri atas unsur fraksi-fraksi dan pimpinan komisi. Setiap pimpinan komisi menyampaikan laporannya dari komisi A hingga komisi E kepada TAPD Pemerintah provinsi. Di rapat tersebut, terjadi pembicaraan berupa verifikasi maupun konfirmasi di kedua pihak, baik komisi dan fraksi DPRD beserta TAPD, untuk kemudian menetapkan sesuai usulan yang tertuang dalam RKA SKPD mengubah dan atau menggeser alokasi anggaran. Setelah semua disepakati bersama, maka pembahasan dilanjutkan ke tingkat dua bersama Gubernur (eksekutif).

Pembahasan tingkat dua dilakukan dalam rapat paripurna DPRD bersama Gubernur. Rapat paripurna ini didahului pendapat akhir Banggar dan pendapat akhir fraksi- fraksi hingga disetujui bersama. Kemudian dokumen pembahasan ini diterimakan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi secara teknokratik. Pihak Kemendagri (Dirjen Bina Keuangan Daerah) akan mengevaluasi sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan, serta sesuai dengan pedoman penyusunan APBD pada tahun itu, maka ada mata anggaran yang diberi catatan, bahkan dihapus beserta penjelasannya. Setelah itu, dokumen evaluasi Kemendagri akan kembali ke daerah untuk dibahas Gubernur dan jajarannya bersama dengan DPRD. Rapat-rapat tersebut untuk melaksanakan tindak lanjut atas evaluasi apabila ada catatan dari Kemendagri. Pembahasan terus dilakukan hingga dokumen APBD dapat disetujui Kemendagri untuk kemudian

ditetapkan di Rapat Paripurna penetapan APBD. Pada tahap itu selesailah pembahasan tingkat dua.

Aspirasi masyarakat lewat jalur **eksekutif** berupa musrenbang dan jalur **legislatif** berupa reses, bertemu dalam dialog interaktif antara eksekutif dan legislatif yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD kemudian digabungkan dengan pokok-pokok pikiran DPRD, untuk langsung dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara eksekutif dan legislatif berupa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Langkah ini langsung diteruskan dengan penyusunan RKA tiap SKPD yang digabung menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tanpa proses pembicaraan pendahuluan antara SKPD dengan DPRD. Menurut teori sistem oleh David Easton dan teori penyusunan kebijakan publik oleh William Dunn, maka langkah ini dianggap tidak lengkap karena meninggalkan satu tahapan yakni formulasi kebijakan dan adopsi kebijakan dalam pembicaraan pendahuluan. Dalam teori manajemen lingkungan Shrivastava pun hal ini dianggap kurang memperhatikan *participatve decision making*.

B. Komitmen *Stakeholders*

1. Lemahnya pengetahuan *stakeholders* mengenai penyusunan Anggaran Berbasis Lingkungan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 32

tahun 2009, dapat menyebabkan tidak terlaksananya visi misi dan program prioritas pembangunan yang berorientasi hijau.

2. Presepsi Personal Stakeholder

Meskipun urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi urusan wajib pemerintah provinsi, namun dalam proses wawancara diketahui bahwa kehadiran lingkungan dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD hampir tidak diperhatikan serius.

3. Kepekaan *Stakeholder* akan tupoksi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan

Kewajiban atas upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tupoksi beberapa SKPD saja, namun harus menjadi *mainstreaming* perencanaan dan penganggaran seluruh SKPD. Kewajiban tersebut akan berkaitan erat dengan tupoksi masing-masing *stakeholders*, maksudnya adalah adanya tupoksi yang dipahami dan dilakukan dengan baik oleh *stakeholders* akan selaras dengan baiknya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut narasumber yang diwawancarai, tidak adanya aturan yang jelas dan pedoman kebijakan di atasnya, membuat kepekaan juga rendah, karena merasa tidak adanya tuntutan terkait penganggaran hijau (berbasis lingkungan).

C. Model Penyusunan Kebijakan Anggaran

Selama ini, di Jawa Tengah model penyusunan anggaran cenderung *top-down* serta tidak mengikutsertakan pemeran serta resmi seperti kaukus lingkungan

hidup dalam DPRD maupun pemeran serta tidak resmi yakni komunitas pemerhati lingkungan hidup sehingga APBD bisa dianggap kurang aspiratif, bahkan istilah anggaran lingkungan masih bisa digunakan untuk kepentingan lain.

Mengacu pada teori preferensi politik *stakeholders* Russel dan teori model Sabatier maka sebaiknya model penyusunan anggaran berbasis lingkungan memadukan antara kepentingan publik dengan penyusunan anggaran berbasis isu dalam hal ini lingkungan, juga memerhatikan preferensi politik pilihan publik.

Selain itu, peran Eksekutif di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam perencanaan anggaran dalam proses pembahasan rencana anggaran masih sangat dominan. Berdasarkan hasil-hasil yang diuraikan dalam penelitian ini terlihat bahwa di Jawa Tengah pada saat ini anggaran berbasis lingkungan secara formal belum memperoleh dorongan dan instrumen yang kuat. Oleh karenanya, di level eksekutif (pemerintah daerah) dalam hal ini SKPD, diperlukan satu instrumen yang diusulkan dalam penelitian ini, antara lain berupa Pernyataan Anggaran Lingkungan (PAL) atau *Green Budget Statement (GBS)*.

V. KESIMPULAN

1. Proses penyusunan APBD di Jawa Tengah seolah telah sesuai dengan kriteria manajemen ekosentris dalam hal *participative decision making*. Namun

demikian, pelibatan masyarakat dan organisasi lingkungan masih sangat rendah. Bahkan ada tahapan yang tidak dilakukan yakni pembicaraan pendahuluan RAPBD.

2. Komitmen para penyusun APBD terbukti tidak konsisten antara dokumen perencanaan dengan rendahnya anggaran untuk lingkungan sehingga anggaran berbasis lingkungan tidak mengantarkan kepada pengarus utamaan pembangunan yang responsif terhadap aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan di semua sektor.
3. Model penyusunan anggaran yang saat ini dipraktikkan di provinsi Jawa Tengah dari aspek formulasi kebijakan menunjukkan bahwa selama ini cenderung menggunakan model yang dominan *top down* yakni mengandalkan dokumen RPJMD yang nota bene adalah representasi janji-janji waktu pencalonan menjadi kepala daerah yang tertuang dalam visi-misi calon Gubernur, sebagaimana teori aktor. Secara regulasi berdasar UU 25/2004 digunakan asas teknokratik saja.

Rekomendasi :

Pemerintah provinsi Jawa Tengah disarankan untuk menerapkan model penyusunan anggaran komprehensif, terfokus dan partisipatif. Disebut juga *Comprehensive, Focused and Participatory Budgeting (CFPB)*. *Comprehensive* artinya tidak ada satupun langkah dalam teori maupun regulasi pengambilan keputusan yang ditinggalkan atau tidak dilakukan. *Focused* artinya sesuai isu yang diangkat atau diperhatikan, maka tidak boleh kemudian disertai kebijakan anggaran yang tak terkait, bila komitmennya pada perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup maka anggaran itu tidak dibebani oleh titipan anggaran lain yang tak terkait. *Participatory* maknanya semua unsur atau semua elemen pemangku kepentingan baik pemeran serta resmi maupun tidak resmi dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan anggaran.

SUMMARY

I. INTRODUCTION

Central Java Province, Indonesia, has low environmental quality indices, being 49-55 in the period of 2009-2011. These figures are well below national rates of 59-61 in the same period (IKLH, 2013). The concept of the environmental quality index (IKLH) is measuring environmental quality as required by the Ministry of Environment in collaboration with the Virginia Commonwealth University (VCU) and Central Statistics Bureau (BPS) using the following indicators: river water quality, air quality, and forest coverage (IKLH, 2013: 3).

The current condition has been worsened by negligence of development programs from the government towards environmental protection and management. Central Java is prone to disasters, such as flood, landslide, inundation, drought, to mention some. These disasters are believed to be the consequence inadequate environmental resilience (Hadi, 2015).

In order to prevent disasters and to promote environmental quality the Provincial Government of Central Java has allocated 0.34% of the its Local Income and Spending Budget (APBD) in the period of 2002-2013. This number is considered inadequate because Law 32/2009 on Environmental Protection and Management requires in article 45 that both central and local governments must allocate adequate budget to promote environmental-based development program. Even, a special allocation with sound environmental concern is necessary.

This study performed an analysis of green budgeting in the Provincial Government of Central Java with the following objectives:

- 1) to analyze the Central Java Local Income and Spending Budget (APBD) formulation process directed towards environment;
- 2) to analyze the commitment of the formulators to Central Java APBD directed towards environmental protection and management; and
- 3) to formulate a recommendation of the green budgeting in Central Java.

II. LITERATURE REVIEW

In the context of environmental management-as the main theory in this study- according to Shrivastava, there are two categories of management: (1) traditional management and (2) ecocentric management. In its organization, traditional management is highly structurally hierarchical, decided from above, its authority is centralized and with different income in high society. Whereas in ecocentric management, not too structural hierarchically, decisions are taken in a participatory manner, with decentralized authority and low incomes of society (Hadi: 2014: xi-xii).

The two management models above are strongly influenced by the processes of each element, the stages to the decision-making process. According to William Dunn, public policy is essentially a reciprocal relationship between the three elements of public policy itself, the policy actors and the policy environment (Dunn, 2003: 44).

Dunn (2003: 24-25) also makes theories about the stages of public policy making into five stages: (1) Agenda Stage Phase, (2) Policy Formulation Phase, (3) Policy Adoption Phase, (4) Implementation Policy Stage , and (5) the stages of the Policy Evaluation.

Meanwhile, according to David Easton (See Varma, 1992), considers that the process of formulating public policy is a system that contains various activities that are interrelated with one another. All inputs (inputs) of various components in a system become energy for the system, so that the system can run. Input is changed by the process in the political system into the policy (output) with all the

consequences that resulted in the system itself and have an impact on community environment.

In addition to the mechanism process, the preparation of a green budgeting is also strongly influenced by the commitment of the stakeholders involved. The commitment, closely related to the theory of political will. According to Carmen Malena (2009: 21-23) political will is divided into three important key factors that influence it; 1). political will, on an individual level, political will can be seen from personal values and self-priorities; 2) political can, viewed from knowledge, expertise, and personal rights; and 3) political must, be influenced by sensitivity to the tasks it carries (sense of duty).

While to find the model of policy, can be seen from the analysis of policy formulation applied. Sabatier (1986: 21-48) introduced two models working on the formulation stage of the policy, ie top down and bottom up models. Sabatier's theory is interpreted by Wibawa (1994: 2) that the policy implementation stage with bottom-up logic is a policy-making process that begins with aspiration absorption, and solicits community support. The implementation of policy with top-down logic is the embodiment of macro policies that are still abstract into a more concrete and micro policy.

In addition to the above-mentioned model, there is a Russell theory, that three models of political-stakeholder preference theory are involved in meeting the demands of green budgeting (Russel 2001: 6-10), namely: Partisan Political Model: goverment party composition influences fiscal resource allocation, Veto: here, the veto is positioned as the individual or institution expected to give approval to the

changing status quo, as well as the Sectoral Preferences Model (public choice): more indicative of public choice than the political and veto-political preferences because politicians and veto actors make the public choice for retrieval decision.

Law 32/2009 on PPLH, requires the Provincial Government to allocate adequate budget for environmental protection and environmental management and development programs. The concept of environmentally budgeting is known as green budgeting. This concept does not specify that the environment-based budget is only located within the government working unit that deals with the environment only or in the context of the province is the Environment Agency (BLH). According to Wilkinson (see kautsar, 2010: 1), green budgeting occurs when elements of environmental sustainability are prioritized in planning, implementing, monitoring, and evaluating in government revenues and expenditures, this is the paradigm built into budgeting. Or it can be simplified to be: everything related to government income and expenditure is sought to maintain the principle of environmental sustainability.

Green budgeting directs government activities funded by national/ local budget, can generate less waste, reduce and use fewer resources, as well as effective, efficient and economical, reduce greenhouse gas effects, and social inequality (Kautsar, 2012: 3). In detail, the theory of green budgeting is actually explained also practical theory as studied in Punjab India becomes a relevant model theory for the issue of issue-based issues for the realization of budget for specific issues, in this case means for environmental issues. (TERI, 2014: 26).

III. RESEARCH METHOD

A. Research location and time

This study took place at government institution of Central Java and its Local Parliament from April 2014 to March 2015. In other words, the study was held during a transition between two terms of the Local Parliament in office (2009-2014 and 2014-2019).

B. Research Design

The study entitled “*Model Kebijakan Anggaran Berbasis Lingkungan (Green Budgeting) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*” applied a qualitative approach with a purposive sampling data collection. The data were collected by analysis of key informants.

The study performed a qualitative approach because it would investigate an unknown and unpredicted phenomenon prior to research observation.

Qualitative research focuses on social reality because social research is an activity process, which aims to understand empirical world of human precisely according to realities. Proponents of qualitative method recommend that to fully comprehend human acts, one does not merely need predetermined theories or concepts of social acts, but also concepts and hypothesis during the data collection and analysis (Hadi, 1997: 1-8).

Data collection methods used in this study are interviews and documents. Interviews were conducted through indepth interviews (Soemotro,

1988: 61) in the form of structured interviews, where researcher has prepared a list of problems and some questions that will be submitted to interviewees.

C. Data Processing and Analysis

Inputs given by stakeholders were treated as primary data. They were collected to fully comprehend all related systems, identify key stakeholders, and investigate stakeholders' interest and environment.

The collections of primary and secondary data were subject to a descriptive analysis to be converted into logical and systematic description by qualifying responses from the informants/respondents and by analyzing them with theories. The principle theory used was environmental management supported by theories of stakeholder (actor theory), system, public policy, commitment, budgeting, and model. Whereas, the practical theory in this study related to ongoing regulations. The analysis of these theories was done by using best practice (empirical theory), in which the study proposed an alternative model, i.e. issue based budgeting.

IV. RESULTS AND DISCUSSION

A. Local Income and Spending Budget Discussion Process

1. Budget Planning Stages

The Regional Development Planning Document is detailed and regulated by Law 32/2004 as amended into Law 23/2014 on Regional Government, more specifically in PP 8/2008 on Regional Development Procedures and Circular Letter (SEB) between the Minister of Home Affairs and Bappenas to regulate the mechanism of the implementation of the Development Planning Forum (Musrenbang) at various levels.

The process begins with a village-level musrenbang followed by elements of the community and village government. The result is a proposed program of activities to be funded by the Village Expenditure Budget (APBDes), local budget districts / municipalities, and provinces. Followed by district level musrenbang, the participants are representatives from the previous musrenbang (village) together with the subdistrict government officials, can also present speakers from the local parliament (DPRD) according to the electoral district. In this forum, village priorities are discussed in order to be included in district priorities. Subsequently, the results document of the district musrenbang were brought to the district / municipality level musrenbang together with the priorities brought by the Regional Instrument Working Unit (SKPD).

SKPD carries its priority in the workplan SKPD document. Then the district / city Musrenbang synchronized the workplan of SKPD document with the results of the subdistrict musrenbang which was later dialogued with the main points of the local representatives (DPRD) mind from the recess into the Working Plan of the Local Government (RKPD). This document serves as guidance in preparing the plan of local budget (RAPBD) for the coming year. So next to the provincial and central levels.

2. Stages of Legislative-Executive Discussion

The discussion of Regional Income and Expenditure Budget (APBD) in local parliament (DPRD) is divided into two stages / levels. At the beginning of the 1st level discussions that took place in the plenary session of the DPRD, the Governor submitted the plan of local budget (RAPBD)'s financial note in the year concerned to be submitted further discussion to the Budget Agency (Banggar). Banggar is then scheduled to meet with the Local Government Budget Team (TAPD) in budget meetings. The explanation is given by TAPD on what the governor has to say in the global financial note submission at the previous plenary session. In the next stage there will be a continued paripala meeting to listen to Banggar's general views and fractions. The general view of the factions in the form of political views of each faction that contains the public expectations of the year's APBD and the problems in.

The next plenary session was held again with the agenda of listening to the governor's response to the general view of the Budget Board and the general view of the factions. In his speech, the Governor may accommodate Banggar's request and the factions, and also explain why the problematic in the society is not accommodated in the plan of local budget (RAPBD) or maybe there will be new digits emerging. The next detailed discussion of the RAPBD is submitted to the existing commissions in the DPRD with the relevant Regional Instrument Working Unit (SKPD). Commission A is in partnership with SKPD in government and the Secretariat of the Governor together with his bureau. Commission B is in partnership with SKPD in agriculture, plantations, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and cooperatives. Commission C partnered with the Regional Revenue and Asset Management Agency (DPPAD). Commission D partners with SKPD in infrastructure, such as Water Resources Management Agency (PSDA), Public Works (PU) - spatial and environmental data. Meanwhile, Commission E partnered with SKPD in the field of people's welfare, including Education Office, Health Office, Social Service, Women and Children, and Disaster. The commissions in detail discussed the RAPBD along with the Work Plan and Budget (RKA) of each SKPD, then each commission brought the conclusion of the commission meeting to be discussed in the budget meeting in Banggar. The second budget meeting in Banggar consists of elements of factions and commission leaders.

Each commission leader submits his report from commission A to commission E to TAPD provincial government. In the meeting, there was a discussion of both verification and confirmation on both sides, both the DPRD commission and the DPRD and the TAPD, to determine according to the proposals contained in the RKA SKPD to change and or to shift the budget allocation. After all agreed upon, then the discussion continued to level two with the Governor (executive).

The second level discussion was conducted in a plenary session of the DPRD with the Governor. This plenary session was preceded by the final opinion of Banggar and the final opinion of the factions to be mutually agreed. Then the document is taken to the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) to be technocratically evaluated. The Kemendagri, Directorate General of Regional Finance will evaluate in accordance with the general interest and legislation, as well as in accordance with the guidelines for the preparation of APBD in that year, there is a budget that is notified, even deleted and its explanation. Subsequently, the Kemendagri evaluation document will return to the region to be discussed by the Governor and his staff along with the DPRD. The meetings are to carry out follow-up on evaluation if there is a note from Kemendagri. Discussions continue until the APBD documents can be approved Kemendagri to then set in the Plenary Session APPD. At that stage finished the second level discussion.

The aspirations of the community through the executive channels in the form of musrenbang and the legislative path in the form of recess, meet in an interactive dialogue between the executive and the legislative that produces the Local Government Work Plan (RKPD). The RKPD is then combined with the main points of the DPRD, to be directly followed by the signing of a memorandum of understanding between the executive and the legislature in the form of the General Policy of Budget (KUA) and the Provisional Budget Priorities and Ceiling (PPAS). This step is directly followed by the preparation of RKA of each SKPD which is combined into Regional Revenue and Expenditure Draft (RAPBD) without preliminary talk process between SKPD and DPRD. According to David Easton's system theory and William Dunn's public policy theory theory, this step is considered incomplete as it leaves behind a stage of policy formulation and policy adoption in preliminary talks. In Shrivastava's environmental management theory, it is considered to be less concerned with participative decision making.

Community aspiration via executives, i.e. development plan forum (musrenbang) and legislatures, i.e. recess, followed by executive-legislature interactive dialogue combined with key points from the Local Parliament (DPRD) and memorandum-of-understanding (MoU) signing between both parties in the forms of General Policy on Budget (KUA) and Priority and Threshold for Temporary Budget (PPAS) become a series of efforts during the discussion process. They are then followed by

Budget Work Plan (RKA) of each Local Performing Unit (SKPD) cumulated as Local Income and Spending Budget Plan (RAPBD) without initial consultation between SKPD and DPRD.

According to David Easton's theory of system and William Dunn's theory of public policy-making, the above efforts is insufficient because it has ignored policy formulation and adoption as required by the initial consultation. Furthermore, Shrivastava's management theory also proves that the efforts have neglected a participative decision-making.

B. Stakeholders' Commitment

1. The lack of knowledge of stakeholders on the preparation of the Environmental Based Budget as mandated by Law 32 of 2009, can lead to the implementation of the vision and the green oriented development priority program.

2. Personal Stakeholder Presentation

Although the affairs of environmental protection and management are mandatory for the provincial government, however, in the interview process it is known that the presence of the environment in the process of drafting and discussing the local budget (APBD) is hardly noticed seriously.

3. Stakeholder sensitivity to basic tasks and function (tupoksi) that support environmental protection and management efforts

The obligation to protect and manage the environment is not only the duty of some Regional Instrument Working Unit (SKPD), but must

become mainstreaming of planning and budgeting of all SKPD. The obligation will be closely related to the tupoksi of each stakeholders, meaning that the tupoksi well understood and done by the stakeholders will be in harmony with the good protection and environmental management. According to resource persons interviewed, the lack of clear rules and policy guidelines above, makes the sensitivity also low, as there is no demands related to green (environmental-based) violations.

Stakeholders had inadequate knowledge about Green Budgeting required by Law 32/2009. It had led to problems facing the vision, mission, and program of development priority towards environment. In addition to the knowledge, the absence of detailed regulations on Green Budgeting was also deemed responsible for the ongoing problems.

C. Model of Policy-making on Environment

So far, in Central Java, the budgeting model has tended to be top-down and does not involve actor and official such as environmental caucus in DPRD as well as actor and unofficial community of environmental observers so that local budget (APBD) can be considered less aspirational, even the term environmental budget can still be used for other interests.

Referring to the political preferences theory of Russell and Sabatier model, theorized that an environmental-based budgeting model should combine public interest with the issue-based budgeting in this environment, also taking into account the preferences of the politics of public choice.

In addition, the Executive's role in Central Java Provincial Government in budget planning in the process of discussing the budget plan is still very dominant. Based on the results outlined in this study, it appears that in Central Java at present the formal environment-based budget has not received strong impetus and instrument. Therefore, at the executive level (local government) in this case SKPD, required an instrument proposed in this study, among others in the form of Environmental Budget Statement (PAL) or Green Budget Statement (GBS).

V. CONCLUSION

1. Local Income and Spending Budget (APBD) formulation in Central Java follow ecocentric management criteria in terms of participative decision-

making. However, community and environmental organization involvement was still inadequate. No initial consultation was found during the formulation of the Local Income and Spending Budget Plan.

2. Commitment of stakeholders who formulate the Local Income and Budget Plan (APBD) was inconsistent with planning document as proven by the inadequate green budgeting and resistance towards mainstreaming development responsive to environmental protection and management in all sectors.
3. The ongoing budgeting model in Central Java Province tended to apply a top-down approach by counting on Local Medium-term Development Plan (RPJM), which contained political promises by the elected local head during the campaign and the candidate's vision and mission, as actor theory explains. In terms of regulation, Law 25/2004 only applied at technocratic discourse.

Recommendation :

It is suggested to the Central Java provincial government to implement a Comprehensive, Focused and Participatory Budgeting (CFPB) model.. Comprehensive means that there is no single step in the theory or regulation of decision making that is left or not done. Focused means that according to the issues raised or noticed, it should not be followed by an unrelated budget policy, if its commitment to the protection and management of the environment then the budget is not burdened by other unrelated budget items. Participatory means that all elements of stakeholders, both officially or unofficially, involved actively in the process of formulating budget policy.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F. 1997. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Alisjahbana, A.S. 2010. *Green Economy For Sustainable Development*. Jakarta.
- Allaby, M. 1979. *Dictionary of the Environment*. London: The Mac Milian Press, Ltd.
- Amir, Ismail. 2009. *Politik Anggaran Daerah, Bahan Modul Executive Training DPRD Baru 2009 – 2014: Menjadikan Wakil Rakyat Semakin Bermartabat*. FITRA.
- Apter, D. E. 1987. *Rethinking Development Modernization ,Dependency, and Postmodern Politics*. London: Sage Publications.
- Apter, D. E. 1996. *Pengantar Analisa Politik*. Terjemah oleh: Setiawan Abadi. Jakarta: LP3ES.
- Arif, A. 2015. *Petisi Para Ahli dan Aktivis Soal Krisis Ekologi ke Jokowi*. KOMPAS, 30 Desember 2015.
- Armstrong, 1995. *Personnel Management Practice*. London: Kogan Page.
- Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta,.
- Badjuri, Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: FISIP UNDIP.
- Berek, dkk. 2006. *Pendidikan Politik Anggaran Bagi Warga*. Jakarta: BIGS Bandung - TIFA Foundation.
- Bloom, S. 2013. *U.S. Department of Energy: Green Energy Efficiency Spruces Budget Practices*. *Public in Review*; 95: 52-78.
- Budianto, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budimanta, A. 2005. *Memberlanjutkan Pembangunan di Perkotaan melalui Pembangunan Berkelanjutan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*.

- Brienkerhoff, D.W. 2000. *Assessing political will for anti-corruption efforts: an analytic framework*. *Public Administration and Development*;20 :239-252.
- Brown, Hitchcock, Marsha L. Willard. 1994. *Why TQM Fails and That to Do About It*, New York: Richard D. Irwin, Inc.
- Cao, Jing. 2010. *Reconciling Economic Growth and Carbon Mitigation: Challenges and Policy Options in China*. *Asian Economic Policy Review*; 5 : 110 – 129.
- Cimpeoru, V.M. 2012. *An empirical study on key indicator of environmental quality: green budgeting – a catalyst for sustainable economy and a factor for institutional change*. *Amfiteatru Economic*; XIV (32): 485-500
- Cohen, Tom. 2012. *Can Participatory Emissions Budgeting help local authorities to tackle climate change?*. *Environmental Development*; 2 : 18 - 35.
- Cottrell, Jacqueline. 2013. *Sustainable Budgeting and Environmentally Harmful Subsidies*. *International Budget Partnership (IBP)*;75 : 3-4
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Deputi Persidangan Sekretariat Kabinet. 2012. *Presiden: Indonesia Pro-Growth, Pro Poor, Pro Job dan Pro Environment*. <http://old.setkab.go.id/berita-4370-presiden-indonesia-pro-growth-pro-poor-pro-job-dan-pro-environment.html>. diakses tanggal 4 November 2014
- Datt, D. 2004. *Green Budget Reform in India: opportunities and challenges In Greening the Budget: case studies*. New Delhi: TERI.
- Held, David. 2006. *Model of Democracy*, Jakarta; Akbar Tandung Institute.
- D.A. Simarmata. 1983. *Operation Research: Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. h.ix--xii
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : PT Hanindita Graha Widya
- Dwidjowijoto, R.N. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.

- Easton, David. 1957. *An Approach to the Analysis of Political Systems*. World Politics;9 (3): 383-400
- Edwards III, George C. 1986. *Implementing Publik Policy*. Washington: CongresionalQuartely Press.
- Effendi M.& Evandri T.S. 2007. HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat.Bogor:Ghalia Indonesia. P: 53.
- Ekowati, Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program*. Surakarta:PustakaCakra
- Feris L "Environment" in Currie I & De Waal J (eds) *The Bill of Rights Handbook*(Juta Cape Town 2006) 521 522
- Friedman, T.L. 2009.*Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. P. 119
- Galarraga, Ibon, Eguino, Mikel Gonzalez, Markandya, Anil. 2011. “*The Role of Regional Governments in Climate Change Policy*”, *Environmental Policy and Governance*.21 :164-182.
- Goleman, D. 2009. *Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency*. London: Penguin Books Ltd.P. 25-28.
- Gomes, Faustino Cardoso. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andy Offset
- Goodman, Nancy, & Sarah Moser. 2013. *1% Green Budget Fiscal Year 2014*. Environmental League of Massachusetts. P 1 – 17.
- Gorres, Anselm, Kai Schlegelmilch&Jackueline Cottrell. 2012. *Green Budget Initiative for East Asia : A Window of Opportunity to Green the Region*. Berlin: GBE. P 1 - 3
- Green Budget Europe. 2011. *Roadmap for Resource Efficient Europe*.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Haas, Peter M. 2012. “*The Political Economy of Ecology : Prospect for Transforming the World Economy at Rio Plus 20*”. *Global Policy*; 3: 94 – 101.
- Hadi, S.P.1997.*Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Sosial Kuantitatif, Kualitatif dan Kaji Tindak*.Semarang: FISIP UNDIP

- Hadi, S. P. 2001. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, S. P., 2009. Aspek Sosial Amdal , Sejarah, Teori, dan Metode. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, S. P. 2009. Manusia & Lingkungan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. P. 2012. Menghijaukan Ekonomi. Artikel Suara Merdeka. 5 Juni 2012.
- Hadi, S.P. 2014. Bunga Rampai Manajemen Lingkungan. Yogyakarta: Thafa Media.
- Hadi, S. P. 2016. KLHS dan Konflik Pabrik Semen. Artikel Suara Merdeka. 8 Agustus 2016.
- Hanafie, Haniah, 2015. Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang Perspektif *Effective governance* (Studi pada Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten). Jakarta: PUSLITPEN LP2M UIN Syarif Hidayatullah.
- Hunawa, R. 2010. Peran anggota DPRD Gorontalo Periode 2004-2009 dalam pembuatan Peraturan Daerah. Jurnal Legalitas; 3 (2): 99-113.
- International Institute for Sustainable Development (IISD). 1994. Tax Credits and the Development of Renewable Energy in California*
- International Institute for Sustainable Development (IISD). 1994. The Tax for Fuel Conservation in Ontario*
- International Institute for Sustainable Development (IISD). 1994. Wind Energy in Denmark*
- Iskandar. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: Gaung Persada Press.
- Islamy, M.I. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ito, Yoshihiro, Yagi, Hiroyuki, Omori, Akari. 2006. The Green-Budget Matrix Model, Sustainability Accounting and Reporting. P 355 - 372.

- Kadir, A. 2005. Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *WahanaHijau*, 1 (1): 27 - 33.
- Kautsar,I. 2012, Indonesia Perlu Green Budgeting, <http://diasporaiqbal.blogspot.com/2010/02/indonesia-perlu-green-budgeting.html>. (12 Desember 2014)
- Keban, Y. T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Public: Konsep, Teori Dan Isu. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kementerian Dalam Negeri RI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2013, Jakarta.
- Keraf ,AS .2006. Etika Lingkungan.Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kismartini, dkk. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kumenaung, Anderson G. 2008. Mengkaji Konsep Pemikiran Pembangunan Berkelanjutan (Sustained Development). *Jurnal PembangunanEkonomidanKeuangan Daerah*; 1 (2) : 1-12.
- Lester, James P. & Joseph Stewart Jr. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Newyork: Wadsworth Thomson Learning.
- Malena, C. 2009. *From Political Won't to Political Will*. Sterling: Kumarian Press. P. 3-30
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 1973. TAP MPR No. 4/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sekretariat MPR RI, Jakarta.
- Mandala, G.P. 2011. Wewenang DPR dalam penetapan dan pengawasan APBN menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Martens, Jens. 2013. No Sustainable Development Goals without Sustainable Development Budgets. *International Budget Partnership (IBP)*;75 : 2.
- Mason, R. & Swanson, T. 2002. The Costs of Uncoordinated Regulation. *European Economic Review*.

- Maryono E, Riyadi S, Aziz M, Adnan Z, dan Jasin FM. 2012 . Pedoman Penguatan Peran Kaukus Lingkungan Hidup Legislatif .Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- Mawardi, I. 2010. Kerusakan Daerah Aliran Sungai dan Penurunan Daya Dukung Sumberdaya Air di Pulau Jawa Serta Upaya Penanganannya. *Jurnal Hidrosfir Indonesia*; 5(2) :1-11.
- Mc. Naughton, S.J. & Larry L. W. 1973. *General Ecology Second Edition*. New Jersey: Saunders College Publishing
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. 1997. *Commitment in the workplace theory research and application*. California: Sage Publications.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. Depok: Universitas Indonesia.
- Miller, G. Tyler Jr. 2007. *Living In The Environment Principles, Connections, and Solutions Fifteenth Edition*. Nelson Thomson Learning. Toronto. Canada
- Modeong, S. 2003. Teknik Perundang-Undangan di Indonesia. Jakarta: Perca.
- Moleong, Lexy, J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhadjir, Noeng. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV, Rake Sarasin: Yogyakarta.
- Mulyanto H R .2007 .Ilmu Lingkungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasir, Moh. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 1993. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Nurmardiansyah, E. 2015. Pengembangan Kesadaran Terhadap Keadilan Lingkungan (*Environmental Justice*) Melalui Penataan Sistem Hukum Berdasarkan Pendekatan Sistem (*Systems Approach*). Disertasi Doktor Ilmu Hukum. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- EAP Task Force. 2010. *Organization for Economic co - Operation and development. 2010. Medium – term Management of Green Budgets : The Case of Ukraine*. EAP Task Force.
- Ogbodo, S. Gozie. 2010. *The Paradox of the Concept of Sustainable Development under Nigeria's Environmental Law*. *Journal of Sustainable Development*; 3(3) :201-207.
- Ondee, Pannarunothai. 2008. *Stakeholder Analysis: Who are the Key Actors in Establishing and Developing Thai Independent Consumer Organizations?*. *International Journal of Human and Social Sciences*; 3(4): 265-275
- Panayotou, T. 2003. *Economic Growth and the Environment*. Cambridge: Harvard University and Cyprus International Institute of Management.
- Paskalis L . 2010. *Politik Lingkungan* . Yogyakarta: Suara Pustaka.
- PemprovJateng. 2011. *Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDG's) di Provinsi JawaTengah 2011-2015*.
- Pitono, Joko. 1998. *IndikatorKemajuan Pembangunan Berkelanjutan*. *Berita Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*; 39 (2) : 75 - 101.
- Prasetijo, A.2012. *Sedikittentang Green Budgeting*. www.prasetijo.wordpress.com. (12 Desember 2014)
- Purnaweni, H. 2004. *Implementasi Kebijakan Lingkungan di Indonesia: Hambatan dan Tuntutan*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*; 1 (3) : 501-512.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Ritzer, G. 2002. Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Robbins, J. 2007. Perilaku Organisasi, Jakarta : Salemba Empat.
- Rohman, H. 2011. Dinamika Politik Reformasi Anggaran Pro Rakyat : studi kepentingan politik Budget Actors dalam Pembahasan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, Thesis. Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Rozidateno, P.H. 2010. Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah: Kasus Proses Penetapan Program dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Penelitian Politik*; 7 (1): 71-86.
- Russel, D. and D. Benson. 2011. *Green Budgeting In An Age Of Austerity: A Transatlantic Comparative Perspective*. London.
- Sabatier, P. 1986. *Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research*. *Journal of Public Policy*; 6: 21- 48.
- Saifullah. 2010. Paradigma Pembangunan Lingkungan Hidup di Indonesia. www.uin-malang.ac.id. (12 Desember 2014)
- Salancik, Gerald. 1995. *Commitment and the Control of Organizational Behavior and Belief, Psychological Dimensions of Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Salim, Emil. 2010. Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi. PT Media Kompas Nusantara, Jakarta.
- Sanit, Arbi. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Setiadi, R., S. Jawoto, M. Sophianingrum, & D. Rosalia. 2008. Indikator Pembangunan Berkelanjutan Kota Semarang. *Riptek*; 1(2) : 1-15.
- Serrano, I. 2013. *Budgeting for the Environment in the Philippines. The E-newsletter of The International Budget*.
- Soemarwoto, Otto. 2001. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sopiah. 2008. Perilaku Organisasi. Yogyakarta : Penerbit Andi.

- Suarna, I.W. 2008. Kaukus Lingkungan DPRD dalam Memperjuangkan Kepentingan Lingkungan dan Mencapai Agenda Politik. *Jurnal Bumi Lestari*; 8 (2): 211-215
- Sugandhy, Aca, Rustam Hakim. 2007. Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. Bogor.
- Suparmoko, M. 2008. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Suatu Pendekatan Teoritis. Yogyakarta: BPF.
- Suprajogo, T. 2011. Evaluasi Kiprah Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD dalam Pengarusutamaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*; 11(2): 138 -155
- Suwarli, R.P., Sitorus, S., Widiatmaka, Putri E.I.K., dan Kholil. 2012. Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan dan Strategi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terbuka berdasarkan Alokasi Anggaran Lingkungan Daerah (Studi Kasus Kota Bekasi). *Forum Pascasarjana*; 35 (1): 37-52.
- Suwitri, Sri. 2009. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: BP Undip.
- Suyono, Aryono, 1985. Kamus Antropologi, Penerbit Cv, Jakarta : Akademik Pressing
- Syaukani dkk, 2005. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- TERI, 2014. *Action Plan for Green Budgeting in Punjab : Concept, Rationale , and Ways Forward.*
- TERI, 2014. *Greening The Budget Case Studies . The Energy and Resources Institute, New Delhi.*
- Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, Sunyoto. 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Varma, S. P. 1992. Teori Politik Modern. Jakarta: Rajawali.

- Violeta, Maria Cimpoeru. 2012. *An Empirical Study On Key Indicators Of Environmental Quality: Green Budgeting - A Catalyst For Sustainable Economy And A Factor For Institutional Change*. 14 (32) : 485 - 500
- Wahab, S. A. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasiyanto. 2004. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Industri Tenun Ikat di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Tesis Program Studi Magister Ilmu Administrasi. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik. Jakarta: Intermedia.
- Widyantoro, Ari Eko. 2009. Implementasi *Performance Based Budgeting*: Sebuah Kajian Fenomenologis. Tesis Program Studi Magister Akuntansi. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Wildavsky, A. & N. Caiden. 2012. Dinamika Proses Politik Anggaran. Yogyakarta: Matapena Consultindo.
- Wilkinson, D., Benson D, Jordan A. 2008. *Green Budgeting*. In Jordan A.J. & Lenschow A. (Ed.): *Innovation in Environmental Policy? Integrating the Environment for Sustainability*. UK: Edward Elgar Publishing Ltd. P. 70-73
- Winarno, Budi. 2004. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo,
- Withgott, Jay, Scott Brennan. 2007. *Environment: The Science Behind The Stories. Second Edition*. San Fransisco: Benjamin Cumming.
- Zaffeer, Razeeya. 2011. *Environmental Performance and Sustainable Development*. *Journal of Sustainable Development*; 4 (6) :181-187.
- Zuriah, Nurul. 2006. Metode penelitian social dan pendidik teori-aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Daftar Pustaka diakses dari internet 8 Mei 2017:

http://www.singaporebudget.gov.sg/data/budget_2016,

http://en.wikipedia.org/wiki/2016_malaysian_federal_budget, Republic of The Phillipines, Department of Budget and Management, National Budget Memorandum No. 124, March 30, 2015, Ministry of Finance Malaysia, 2016 Budget Allocation, Federal Government Administrative Centre 62592 Putrajaya Malaysia, Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Analysis of Revenue and Expenditure Financial Year 2016, Summerises and Provides Relevant Highlight of the FY 2016 Revenue and Expenditure Estimates Presented to Parliament on 24 March 2016